

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan diuraikan dari permasalahan utama yang memberi pengaruh besar dalam keberhasilan pembangunan yang penanganannya dilakukan oleh lintas sektor pembangunan dan permasalahan setiap sektor pembangunan sebagai gambaran umum kondisi daerah yang dikemukakan pada Bab sebelumnya.

##### **4.1.1 Permasalahan Lintas Bidang: Tata Kelola Pemerintahan**

Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik adalah faktor dan prasyarat utama dalam keberhasilan pembangunan, penerapannya ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan adalah birokrasi pemerintahan belum efisien dan efektif, masih rendahnya integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah provinsi Gorontalo terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *culture set*. Sampai dengan tahun 2015 telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan pemerintah dan seluruh SKPD dalam menjabarkan rencana aksinya. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah, nasional dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Untuk itu, penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk (i) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan disegala bidang; (iii) peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah; dan (iv) peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **4.1.2 Permasalahan Lintas Bidang: Peningkatan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan**

Dalam mewujudkan masyarakat Gorontalo yang maju dan sejahtera dibutuhkan kemandirian ekonomi, pembangunan ekonomi daerah harus menempatkan rakyat sebagai objek utama di dalam pengelolaan keuangan daerah dan sebagai pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi. Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; terciptanya sektor ekonomi daerah yang kokoh; serta terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan memberikan kesempatan pada peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang pada peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penciptaan stabilitas ekonomi daerah yang kokoh agar kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh juga akan melindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena kenaikan harga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju, selain itu diperlukan pula upaya agar semua masyarakat dapat menikmati kemajuan ekonomi yang terjadi secara berkeadilan. Dengan demikian tujuan untuk memajukan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah :

- Dari sisi ekonomi makro, perekonomian daerah sangat tergantung dari ekonomi nasional dan ekonomi nasional akan terpengaruh dari kondisi perekonomian global sehingga memburuknya perekonomian global akan berpengaruh pada perekonomian nasional hingga ke daerah. Disamping itu, perekonomian Gorontalo terbesar dibentuk oleh sektor primer yang sangat terpengaruh oleh dampak perubahan iklim dan cuaca.

- Adanya ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dari sisi pendapatan daerah.
- Hingga saat ini pendapatan daerah utamanya dari pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu digali potensi penerimaan dan retribusi daerah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih memiliki ketergantungan yang besar dari Dana Alokasi Umum, hingga saat ini pendapatan daerah utamanya diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, belum ada upaya pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dengan menggali potensi penerimaan pajak dari berbagai sektor ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang memang saat ini kondisinya perlu direvitalisasi.
- Secara kuantitas belanja pemerintah daerah terus meningkat, namun tidak secara kualitas. Dari komposisi makro selama empat tahun terakhir belanja publik rata-rata mencapai 70 persen, namun kualitas belanjanya masih tergerus oleh cukup besarnya komponen belanja untuk aparatur. Komposisi belanja modal selama ini hanya berkisar di kurang lebih 20 persen saja dari total APBD.

#### **4.1.3 Permasalahan Lintas Bidang: Penanggulangan Kemiskinan**

Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan, termasuk perkembangan perekonomian nasional dan global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Hingga tahun 2016 persentase angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi, berada diangka 17,63 persen lebih tinggi dari persentase angka kemiskinan rata - rata nasional yang berada diangka 11,13 persen, ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat juga masih terjadi, hal ini ditunjukkan indeks gini masih sebesar 0,41 di tahun 2016. Kondisi ini mengharuskan kerja keras dan upaya yang lebih sungguh - sungguh dari semua pihak terutama pemerintah daerah untuk merumuskan program - program penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat dan tepat sasaran melalui 4 (empat) klaster, yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil, dan program-program pro rakyat.

#### **4.1.4 Urusan Pendidikan**

**Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun.** Wajar 12 tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan sebagaimana amanah Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun harus mencakup keseluruhan proses pendidikan sampai siswa menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan hal tersebut, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan harus dapat diatasi.

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun menuntut kinerja maksimal untuk menjamin semua anak usia 7-18 tahun dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Permasalahan pendidikan jenjang menengah adalah bahwa hingga tahun 2016 Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK baru mencapai 76,13 persen dan SMP/ MTs baru mencapai 75,43 persen. Sementara untuk angka partisipasi kasar untuk anak usia 7 – 12 tahun (SD/MI) sudah cukup baik, berada diangka 111,40 persen, namun untuk anak usia 13 – 15 tahun (SMP/MTs) masih berada diangka 99,75 persen dan untuk anak usia 16 – 18 tahun (SMA/MA/SMK) masih berada diangka 93,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah dari tingkat SD/MI yang tidak lanjutkan ketingkat SMP/MTs/ sederajat dan anak usia sekolah pada tingkat SMP/MTs/ sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK, mereka adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan menengah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketersediaan fasilitas, daya jangkauan terhadap fasilitas, keterjangkauan pembiayaan, kualitas layanan yang disediakan. Tingginya biaya pendidikan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan menengah pada kelompok miskin. Kualitas pendidikan menengah juga masih rendah karena belum semua sekolah/madrasah memiliki fasilitas memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas.

Kualitas pendidikan menengah juga masih rendah karena belum semua sekolah/madrasah memiliki fasilitas memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, pembangunan pendidikan menengah pada kurun waktu lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah melalui Wajar 12 Tahun dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta membangun sistem yang lebih komprehensif melalui penyediaan alternatif pembelajaran yang beragam agar siswa dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal.

**Kualitas, Kompetensi, dan Profesionalisme Guru.** Hingga tahun 2016 berdasarkan profil pendidikan, masih terdapat banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4. Pada jenjang SD/MI dari 13.473 Guru, baru sebanyak 9.954 guru yang berkualifikasi S1/D4 dan 260 guru yang berkualifikasi S2 atau lebih. Pada jenjang SMP/MTs dari 5.260 guru, baru sebanyak 4.193 yang berkualifikasi S1/D4 dan 237 Guru yang berkualifikasi S2. Pada jenjang SMA/MA/SMK dari jumlah 4.182 guru, baru sebanyak 3.231 yang berkualifikasi S1/D4 dan sebanyak 36 yang berkualifikasi S2 atau lebih. Meskipun guru-guru telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4, hal ini belum tercermin pada tingginya kompetensi mereka. Uji kompetensi guru yang dilakukan pada tahun 2012 secara nasional terhadap sekitar 850 ribu guru menunjukkan bahwa rata-rata nilai uji kompetensi guru adalah sekitar 43 dari skala nilai 0 – 100. Untuk itu, diperlukan upaya lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru yang akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.

**Jumlah, Penyebaran dan Distribusi Guru.** Sejak pelaksanaan otonomi daerah jumlah guru di Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, penambahan guru baru tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan jumlah tenaga pendidik, sehingga pertumbuhan jumlah guru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa. Hal ini berakibat pada terus mengecilnya rasio guru murid, yang pada tahun 2016 untuk SD berada diangka 1:15, untuk SMP 1:12 dan untuk SMA/SMK berada di angka 1:13. Sementara untuk madrasah lebih kecil lagi, yaitu 1:12 untuk MI, 1:10 untuk MTs, dan 1:8 untuk MA. Rasio guru-murid per kelas rata-rata yang makin rendah ini menciptakan pemanfaatan guru yang tidak efisien. Padahal rasio guru-murid di negara-negara berpendapatan setara dengan Indonesia (berpendapatan menengah bawah) rasio guru–murid idealnya sebesar 1:29 (SD), 1:24 (SMP), dan 1:20 (SMA).

Disisi lain, distribusi guru yang tidak merata juga menimbulkan permasalahan lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Ada kecenderungan bahwa guru berlebih di daerah perkotaan yang menyebabkan beban mengajar seorang guru menjadi terlalu rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam tatap muka. Di sisi lain, sekolah sekolah di daerah perdesaan mengalami kekurangan guru sehingga proses pembelajaran berlangsung tidak efektif.

**Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi.** Permasalahan pokok yang mengemuka adalah akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata, bahkan ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak nyata. Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi, terhambat oleh ketiadaan biaya. Kendala finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

#### **4.1.5 Urusan Kesehatan dan Gizi Masyarakat**

**Kesehatan Ibu dan Anak.** Indikator peningkatan kesehatan ibu dalam Tujuan Pembangunan Milenium Berkelanjutan (SDGs) adalah penurunan kematian ibu yang dihubungkan dengan peningkatan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (MDG s). Melihat data trend Angka Kematian Ibu (AKI) yang terus mengalami peningkatan dari 194,8 per 100.000 Kelahiran Hidup (39 kematian dari 20.031 Kelahiran Hidup) pada Tahun 2014 menjadi 301,7 per 100.000 Kelahiran Hidup (61 kematian dari 20.222 Kelahiran Hidup) tahun 2016, ini menunjukkan tujuan ketiga dari SDGs yakni peningkatan kualitas hidup dengan target mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 sangat sulit untuk dicapai, jika upaya yang dilakukan hanya dengan mengatasi faktor penyebab langsung kematian ibu, tetapi tidak mengatasi faktor penyebab tidak langsungnya.

Tantangan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu saat ini yakni : 1) Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja dan memperbaiki status gizi dan kesehatan lingkungan ibu hamil dengan keanekaragaman makanan menjadi potensi peningkatan gizi ibu hamil dan pengembangan paket pemberian makanan tambahan ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien; 2) Menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang saat ini berdasarkan hasil mapping sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak di 93 puskesmas tahun 2015 hanya 50% yang sesuai standar; 3)Penguatan tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu dan anak

hususnya bidan yang tersebar di fasilitas pelayanan primer (puskesmas) belum semua mempunyai kompetensi standar yang memadai dalam Asuhan Persalinan Normal (APN), dari data 856 bidan tahun 2016 yang ada hanya 248 bidan yang sudah dilatih APN, serta terdapat beberapa puskesmas perawatan yang sudah dilatih PONEC tetapi timnya sudah tidak lengkap karena adanya mutasi tenaga, sehingga fungsi puskesmas PONEC sebagai pusat penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak tingkat pertama tidak maksimum; 4); Penguatan sistem rujukan yang belum maksimal di kabupaten kota, dan kesiapan faskes penerima rujukan serta penyiapan transportasi yang sesuai standar rujukan, serta; 5) Menggalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang; 6) Permasalahan utama dari point 1 – 4 merupakan kewenangan dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan SPM bidang kesehatan yang perlu menjadi perhatian dalam pengalokasian program kegiatan dan pembiayaan, yang nantinya akan mendapatkan dukungan Pemerintah Provinsi untuk pencapaian SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota.

**Perbaikan Gizi Masyarakat.** Prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dari 24,5% tahun 2015 menjadi 22,25% tahun 2016 namun masih di atas target RPMD tahun 2016 yakni 13,56%. Permasalahan utama mengenai gizi masyarakat adalah disebabkan oleh dua hal yang saling berkaitan yakni : Permasalahan pertama; kurang asupan makanan antara lain disebabkan oleh pola asuh /perilaku ibu memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi kecukupan gizi anak balitanya, selain ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga terutama pada keluarga miskin. Ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga tidak terlepas dari hasil produksi pertanian, perikanan, serta distribusi pangan yang ada di masyarakat dan daya beli pangansampai di tingkat keluarga. Oleh sebab itu Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Pembelajaran Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo terus dimantapkan ditingkat masyarakat, serta pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya alam wilayah provinsi Gorontalo yang kaya bahan pangan, dan; Permasalahan kedua; tingkat kesakitan anak termasuk diare, cakupan imunisasi lengkap pada bayi, dan akses terhadap air minum dan sanitasi juga menjadi pencetus masalah gizi masyarakat. Data menunjukkan angka kesakitan yang disebabkan oleh diare per 1.000 penduduk tahun 2016 mencapai 19,22, cakupan imunisasi baru mencapai 89,60% dari target RPJMD tahun 2016 sebesar 93,75%, serta rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air bersih sebesar 69,5% dan penduduk yang memiliki akses sanitasi layak hanya 56,27% hingga tahun 2016.

Tantangan dalam peningkatan status gizi masyarakat adalah meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi upaya perbaikan gizi termasuk peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, dan mendorong pola hidup makan sehat terutama dengan penurunan konsumsi gula, lemak, dan garam untuk menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular.

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres No. 42 Tahun 2013) menjadi landasan dalam integrasi intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan) yang sejalan dengan pembangunan gizi global yaitu *Scaling Up Nutrition (SUN) Movement*. Gerakan ini difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan komitmen pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

**Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.** Dari sisi pengendalian penyakit dan peningkatan kesehatan lingkungan, permasalahan yang dihadapi adalah penyakit menular dan tidak menular. Saat ini prevalensi penyakit tidak menular cenderung meningkat dikarenakan meningkatnya faktor resiko seperti hipertensi mencapai 29%,tingginya glukosa darah, dan obesitas mencapai 33,3% (Risikesdas 2013). Hal ini disebabkan oleh pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Sementara untuk penyakit menular, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi endemis. Tahun 2016 yang meninggal akibat DBD mencapai 6,5% (25 orang dari jumlah kasus DBD 692 orang) target nasional <1%. Sedangkan untuk Angka Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk tahun 2016 mencapai 249, Jumlah penderita HIV tahun 2016 mencapai 100 orang dan penderita AIDS mencapai 160 orang.

Tantangan yang dihadapi dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular perlu difokuskan pada penyakit-penyakit yang memberikan beban (*burden of disease*) yang besar serta penyakit yang dapat berdampak pada pembiayaan yang besar antara lain melalui : 1) Peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk munisasi; 2) Peningkatan penemuan kasus dan tata laksana kasus serta peningkatan upaya eliminasi penyakit terabaikan; 3) Peningkatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), dan; 4) Peningkatan penyehatan lingkungan melalui



peningkatan akses dan penggunaan air dan sanitasi yang layak serta meningkatkan kualitas lingkungan.

**Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.** Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo antara lain keterbatasan sarana dan prasarana serta Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak puskesmas yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar *guideline* pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014, dimana pada tahun 2016 dari 93 Puskesmas hanya 11 Puskesmas yang sudah memenuhi standar.

Dalam mengoptimalkan penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak di puskesmas, selama tahun 2012 – 2014 ada 22 puskesmas yang dilatih Tim PONEK tetapi sampai dengan tahun 2016 Tim yang terdiri dari dokter, perawat dan bidan yang sudah dilatih tersebut tidak lengkap lagi terutama dokter dan perawat, akibat adanya mutasi tenaga dan juga berakhirnya masa bakti dokter PTT, sehingga fungsi puskesmas PONEK sebagai pusat penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak tingkat pertama tidak maksimum. Sedangkan di tingkat FKTL dari 9 RSUD milik pemerintah daerah, baru 5 (lima) RSUD yang sudah mampu PONEK yakni RSUD Aloe Saboe, RSUD MM Dunda, RSUD Toto Kabila, RSUD Tani Nelayan dan RSUD Bumi Panua, tetapi RSUD Bumi Panui sudah tidak mempunyai dokter obstetri.

Dari sisi pemenuhan Kapasitas Tempat Tidur (TT) dari 9 RSUD di Provinsi Gorontalo tahun 2016 mencapai 1.192 TT dengan Rasio TT : 0,012/1.000 Penduduk belum mencapai target RPJMD Tahun 2016 yakni 0,85/750 Penduduk. Berdasarkan rekomendasi WHO idealnya sebesar rasio tempat tidur sebesar 25 per 10.000 penduduk. Sedangkan persentase BOR (*Bed Occupancy Rate*) atau pemakaian tempat tidur tahun 2016 baru mencapai 42,5% (standar nasional 80%) dan LOS (*Length of Stay*) atau rata-rata lama perawatan 3 – 6 Hari (standar nasional 6 – 9 hari).

Tantangan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan adalah : 1) mendorong FKTP dan FKTL untuk terakreditasi nasional, dimana sampai dengan tahun 2016 dari 93 puskesmas baru 23 puskesmas yang terakreditasi nasional dan dari 9 (sembilan) RSUD baru 3 (tiga) RSUD yang sudah terakreditasi nasional; 2) Mendorong Peningkatan kelas pelayanan untuk RSUD Ainun Habibie dari Type D ke Tipe C; 3) Penguatan dan peningkatan upaya promotif dan preventif di FKTP/Puskesmas; dan 4) Penguatan sistem rujukan didukung oleh sistem informasi yang memadai.

**Sumber daya manusia kesehatan.** Permasalahan terkait dengan SDM kesehatan di Provinsi Gorontalo adalah jumlah dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Dalam hal ketersediaan di tingkat populasi, WHO merekomendasikan 10 dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Hingga tahun 2016 pemenuhan tenaga kesehatan di FKTP belum terpenuhi. Dari 93 Puskesmas yang ada di Provinsi Gorontalo baru 2 (dua) Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan (dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, kesmas, kesling, analis, gizi dan farmasi) yang dipersyaratkan oleh Permenkes 75 Tahun 2014 yakni Puskesmas Tibawa dan Puskesmas Telaga Kabupaten Gorontalo. Sedangkan untuk Rumah Sakit kelas C dan D, dari 7 Rumah Sakit baru RSUD Tani Nelayan Kabupaten Boalemo yang telah yang memiliki 4 dokter spesialis dasar (penyakit dalam, kebidanan & kandungan, spesialis anak dan bedah) dan 3 dokter spesialis penunjang (Radiologi, Anastesi dan Rehab Medik) berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014.

Tantangan dalam pemenuhan SDM kesehatan adalah :1) menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di FKTP dan FKTL; 2) penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh tenaga kesehatan; dan 3) peningkatan kompetensi nakes melalui pendidikan dan pelatihan.

**Pengembangan Jaminan Kesehatan.** Untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi pada periode 2012 – 2017 melalui program Jamkesta telah melaksanakan jaminan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004 untuk mencapai *universal health coverage*. Hingga tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan Jaminan Kesehatan kepada 235.058 jiwa/tahun, namun masih ada juga masyarakat yang kurang mampu belum memiliki jaminan kesehatan.

Tantangan dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) adalah : 1) Meningkatkan pelayanan kepesertaan; 2) Mengembangkan manfaat jaminan, menyiapkan standar, dan menjamin pemenuhan standar sarana, tenaga, dan manajemen pelayanan kesehatan.

#### **4.1.6 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan pekerjaan umum terletak pada upaya peningkatan daya saing infrastruktur yang mencakup kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti jalan, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara (bandara), energi, ketenagalistrikan, serta telekomunikasi. Di samping itu, upaya perbaikan kinerja infrastruktur juga diprioritaskan pada infrastruktur bendungan, jaringan irigasi, serta jaringan sanitasi dan air minum dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produksi hasil pertanian, ketahanan pangan, energi, dan ketahanan air.

Sementara dari total panjang jalan Provinsi, yang memiliki kondisi baik sepanjang 209,00 atau sebesar 48,32%, kondisi sedang rusak sepanjang 15,80 km atau sebesar 3,65%, untuk kondisi rusak ringan sepanjang 24,43 atau sebesar 5,65%, sementara kondisi jalan dengan kategori rusak berat sepanjang 73,33 km atau sebesar 16,95 persen. Jalan yang belum tembus/terbuka masih sepanjang 109,95 Km, seperti ruas Tapa-atinggola 12 Km, Marisa-Tolinggula 59,75 Km, Aladi-Tulabolo 22 Km, Tangkobu-Pentadu 16,20 Km) pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan percepatan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu prasyarat dari kondisi ketahanan air tercermin dari kemampuan menyimpan air baik yang tersimpan secara alami maupun yang tersimpan dalam bangunan penampung air. Sejak periode 2012 – 2017 pemerintah provinsi telah mengupayakan pembangunan beberapa bendungan dan rencana pembangunan waduk Bone Hulu, yang hingga tahun 2016 masih mengalami hambatan disebabkan oleh keterlambatan persiapan pembangunan (Studi Potensi, FS, SID, DED, AMDAL, Sertifikasi).

Jaringan Irigasi Air Permukaan yang sebesar 17.131 Ha dalam pengelolaannya memerlukan rehabilitasi baik rehabilitasi ringan maupun rehabilitasi berat, pemeliharaan dan peningkatan operasi.

Disamping itu, Provinsi Gorontalo termasuk salah satu daerah di Indonesia yang masuk kategori tinggi rawan bencana, hingga saat ini permasalahan mendasar yang ada yaitu masih rendahnya usaha preventif di dalam memperkecil kemungkinan timbulnya bencana, masih maraknya penebangan liar (illegal logging) untuk membuka lahan baru dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air, belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga

menyebabkan banjir. Untuk itu, upaya rehabilitasi dan reboisasi hutan, kawasan dan lahan kritis perlu ditingkatkan, sejalan dengan itu, sistem drainase perlu diperbaiki, sehingga potensi banjir bisa diperkecil. Selain itu, kerawanan daya rusak air terutama di kawasan perkotaan terus meningkat seiring dengan perubahan pola dan intensitas curah hujan, yang diimplifikasi dengan perubahan *land cover of forestry*, serta rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir dan genangan. Salah satu penyebab peningkatan intensitas aliran permukaan adalah perubahan tata guna lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mendukung fungsi konservasi. Hampir setiap tahun terjadi peristiwa banjir dan tanah longsor di Gorontalo. Kerawanan daya rusak air terjadi sebagai dampak dari peningkatan aktivitas masyarakat di wilayah badan sungai, yang diperparah dengan buruknya sistem drainase makro-mikro dan pembuangan sampah ke badan sungai. Belum berfungsinya sistem peringatan dini secara baik dan terintegrasi untuk memprediksi peningkatan aliran sungai, merupakan salah satu kendala dalam mengurangi dampak akibat daya rusak sungai. Di samping itu, peta daerah rawan bencana akibat daya rusak sungai belum tersedia dengan baik.

Kemudian, sebagaimana garis pantai Gorontalo yang sepanjang 590 km yang hampir seluruh garis pantainya didiami oleh penduduk dan pemukiman dan berbagai aktivitas ekonomi, adalah hal yang juga memerlukan upaya perlindungan dari potensi abrasi pantai dan banjir.

Beberapa permasalahan utama dalam bidang pekerjaan umum adalah :

1. Kondisi jalan/jembatan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi.
2. Menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air.
3. Tingginya Laju alih fungsi lahan pada sawah/irigasi teknis.
4. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan.
5. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
6. Rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir, genangan dan abrasi pantai.

Tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan aksesibilitas akibat ketidakterediaan prasarana dan sarana infrastruktur, dan kesiapan infrastruktur untuk aktivitas ekonomi dan sosial.

Sementara permasalahan dalam penataan ruang yang akan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan 5 tahun kedepan adalah belum tersedianya rencana rinci tata ruang, baik itu berupa kawasan strategis maupun rencana detail tata ruang; Belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang wilayah dalam perencanaan pembangunan; Dan belum optimalnya fungsi dan peran dari Badan Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD).

#### **4.1.7 Urusan Perumahan dan Pemukiman**

Masyarakat berpenghasilan rendah perlu mendapatkan perhatian dalam pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar. Semenjak tahun 2012 – 2015 pemerintah Provinsi Gorontalo telah berhasil membangun 3.036 rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

**Prasarana Dasar Kawasan Pemukiman.** Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk. Hingga tahun 2016, masih terdapat 28,41 persen penduduk yang belum memiliki akses air minum layak dan 40,15 persen penduduk yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak. sementara itu upaya pembangunan pengelolaan persampahan secara terpadu telah dimulai dari tahun 2011 yaitu, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) 3R sebanyak 4 unit. Disamping itu, telah dibangun tempat pembuangan akhir (TPA) Talumelito yang diperuntukkan untuk melayani 2 (dua) wilayah yaitu kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dengan kapasitas tampung kurang lebih 355.670 m<sup>3</sup>. TPA tersebut telah mulai di fungsikan sejak bulan September 2011 dengan sistem sanitari landfill dan juga berfungsi sebagai Kawasan Industri Pengelolaan Sampah (KIPS). Sampai tahun 2016 di Provinsi Gorontalo telah dibangun beberapa TPA dengan sistem *sanitari landfill*. Adapun kebutuhan untuk layanan daya tampung TPA 5 (lima) tahun kedepan adalah + 4.745.000 m<sup>3</sup>, sehingga masih dibutuhkan pembangunan TPA yang ramah lingkungan + 4.089.849 m<sup>3</sup>. Berdasarkan kemampuan daya tampung TPA tersebut maka dibutuhkan pembangunan baru di Kab. Bone Bolango serta pengembangan sarana prasarana TPA

yang ada saat ini. Khusus TPA Talumelito diperlukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi saat ini belum mencakup strategi manajemen aset yang tepat khususnya terkait pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga mempersingkat usia ekonomis dari infrastruktur terbangun. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemanfaatan alternatif sumber air baku, contohnya air hujan dan daur ulang, belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Disamping itu, masih terdapat beberapa kawasan kumuh yang tersebar, terutama di Kota Gorontalo yang memerlukan perhatian dan penanganan secara lebih optimal.

#### **4.1.8 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memperkuat keberpihakan pada masyarakat terkait enam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang salah satunya adalah menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan melakukan perlindungan terhadap masyarakat.

Permasalahan dalam menjamin ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah adanya kecenderungan mulai rendahnya komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, makin tingginya potensi konflik akibat perbedaan agama dan etnis dampak dari kemudahan akses teknologi dan informasi, makin rendahnya karakter dan wawasan kebangsaan masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila; belum optimalnya kelembagaan dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; dan masih rendahnya intensitas lembaga yang berwenang dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah secara kontinue.

#### 4.1.9 Urusan Sosial

Hal utama yang perlu menjadi perhatian dalam urusan kesejahteraan sosial adalah bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang persentasenya masih cukup tinggi, yaitu sebesar 17,63 persen di tahun 2016, melindungi dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama penyandang disabilitas dan penduduk lansia. Amanat konstitusi mendorong Pemerintah untuk memenuhi hak-hak setiap penduduk, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19/2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional, menjadikan provinsi Gorontalo ikut berkomitmen melakukan segala upaya untuk merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, seperti akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan; transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungan sosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukum, politik, dan kewarganegaraan; informasi dan komunikasi; serta sistem sosial di masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia akan terus meningkat, peningkatan proporsi penduduk lansia ini akan membawa dampak terhadap situasi sosial ekonomi dalam keluarga, masyarakat dan pemerintah. Implikasi ekonomi yang paling utama dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan rasio ketergantungan usia lanjut (*old age dependency ratio*), dimana setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Untuk itu penduduk usia lanjut harus didukung untuk memiliki masa produktif yang lebih panjang, sehingga beban ekonomi penduduk usia produktif tidak menjadi semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2015 di Gorontalo terdapat 75.958 atau 6,8 persen penduduk lansia. Penyandang disabilitas dan lansia sering menghadapi resiko kerentanan karena belum adanya kebijakan yang terstruktur, masif dan berpihak. Mereka akan menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan berusaha. Layanan publik dan lingkungan masyarakat yang tidak inklusif juga sering menghambatnya untuk mandiri. Keterbatasan data terkait keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas dan lansia merupakan salah satu penyebab sering terabaikannya pemenuhan hak mereka. Hal inilah yang sering kali menghambat penyediaan layanan dan akses bagi penyandang disabilitas yang akhirnya berdampak pada risiko ketelantaran dan kemiskinan.

Tantangan penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas adalah pada terbatasnya kapasitas dan pemahaman Pemerintah dan masyarakat umum akan keberagaman kondisi dan keberadaan penyandang disabilitas. Masyarakat pada umumnya juga masih belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas pada posisi yang setara dan sama haknya untuk hidup dan berusaha. Tantangan pada kelompok penduduk usia lanjut adalah rendahnya pelayanan dan sering terabaikan, penyebabnya antara lain belum sempurnanya skema perlindungan sosial, baik bantuan maupun jaminan sosial. Kemiskinan dan ketelantaran merupakan ancaman terbesar bagi lanjut usia. Lanjut usia umumnya memiliki keterbatasan untuk beraktifitas ekonomi karena sakit ataupun menyandang disabilitas. Kemiskinan anak dan keluarga mereka kemudian memperbesar resiko lanjut usia untuk mengalami eksklusi sosial dan ketelantaran dalam kehidupan sehari-hari.

#### **4.1.10 Urusan Tenaga Kerja**

Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal adalah permasalahan utama dalam pembangunan tenaga kerja. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah, hal ini disebabkan secara keseluruhan rata-rata tingkat pendidikan pekerja di Gorontalo masih rendah, sekitar 57,01 persen pekerja adalah tamatan pendidikan SD.

Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan menyebabkan perusahaan/industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Cakupan angkatan kerja yang memperoleh pelatihan masih sangat rendah dan sebagian besar belum memiliki sertifikat kompetensi. Kondisi ini turut menyebabkan kualitas angkatan kerja menjadi rendah, sehingga produktivitasnya pun tergolong rendah. Sementara itu, kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja serta kurangnya perlindungan sosial masih merupakan cerminan dari penduduk yang bekerja yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja adalah : 1) meningkatkan produktivitas melalui realokasi tenaga kerja ke arah sektor dan sub-sektor kegiatan ekonomi dengan produktivitas tinggi terutama pada sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam ketahanan pangan dan Sektor industri yang mempunyai potensi



dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup. Industri padat pekerja juga didorong untuk memberikan pekerjaan bagi penduduk yang tingkat pendidikannya rendah. 2) Meningkatkan standar hidup pekerja dengan pendapatan terendah (termasuk pekerja miskin), melalui penyediaan kesempatan kerja produktif. 3) meningkatkan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sesuai tingkat pendidikannya, hal ini terkait dengan meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja usia muda (19-24 tahun) berpendidikan tinggi. 4) membekali tenaga kerja dengan keterampilan dan keahlian dalam menghadapi keterbukaan pasar, hal ini dilakukan dalam mengantisipasi pergerakan bebas tenaga kerja hanya berlaku untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau *skilled labor*. 5) Mengoptimalkan pasar tenaga kerja di daerah, dan 6) Membangun kesepakatan kerja bersama untuk menjaga keberlangsungan usaha untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan secara konsisten.

#### **4.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Pemberdayaan Perempuan.** Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Pemberdayaan perempuan juga terkait dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG untuk mengawal pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan. Sejak tahun 2013 dalam upaya meningkatkan kelembagaan PUG ditingkat nasional dan daerah telah disusun Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Untuk memperkuat dan mengawal pelaksanaan PPRG di daerah telah disahkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Namun hingga tahun 2015, berbagai pedoman dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG tersebut belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait

PUG/PPRG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi SKPD/lembaga pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; (iii) kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil keputusan di SKPD/lembaga pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG/PPRG.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan antara lain: (i) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkait peraturan perundangundangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (ii) belum optimalnya koordinasi antar SKPD/Lembaga dan antara pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (iii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM di SKPD/Lembaga layanan terkait kekerasan terhadap perempuan; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, adalah: (i) meningkatkan kapasitas Lembaga koordinator terkait PUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD/lembaga daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; (ii) meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan. Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (i) meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang peraturan perundangundangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (ii) meningkatkan koordinasi SKPD/Lembaga dan pusat-daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (iii) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM di SKPD/unit layanan terkait kekerasan terhadap perempuan; dan (iv) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

**Perlindungan Anak.** Sebagaimana UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka hal ini juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Permasalahan dalam perlindungan anak masih diperhadapkan dengan (i) masih rendahnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak dari berdasarkan kepemilikan akte kelahiran, status kesehatan, partisipasi pendidikan, pengasuhan yang baik, serta perwujudan lingkungan ramah anak untuk membangun resiliensi dan stimulasi optimal bagi anak. (ii) masih rendahnya upaya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran, (iii) Belum efektifnya kelembagaan perlindungan anak, dan (iv) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD/Lembaga dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak merupakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian.

Tantangan dalam perlindungan anak kedepan adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial, termasuk akses anak rentan terhadap layanan yang dibutuhkan serta meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan mengupayakan rehabilitasi korban secara efektif menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

#### **4.1.12 Urusan Pangan**

Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian, antara lain adalah kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terutama padi terhadap pertumbuhan sektor pertanian cukup besar, akan tetapi peningkatan ke depan semakin lambat. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh :

1. Lahan pertanian yang semakin terbatas karena upaya perluasan areal pertanian semakin sulit sementara konversi lahan pertanian pangan produktif ke pertanian lainnya maupun non pertanian terus terjadi.
2. Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang sebagai akibat kerusakan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan persaingan penggunaan air untuk kebutuhan sektor lain, dan rusaknya jaringan irigasi.

3. Peran penyuluhan belum optimal sehingga pengawalan produksi di lapangan tidak terjadi.
4. Produksi pangan masih sangat rentan terhadap dampak iklim/cuaca ekstrim, khususnya perubahan pola hujan dan meningkatnya ancaman hama dan penyakit.
5. Keragaman konsumsi masih rendah, masyarakat cenderung tergantung pada beras saja.

Di bidang perikanan, kemampuan menyediakan ikan sebagai sumber protein konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku industri pengolahan dihadapkan pada kondisi

1. Masih tingginya harga input seperti pakan ikan dan BBM
2. Semakin menurunnya kualitas lingkungan perairan (mangrove, terumbu karang, sungai, danau).
3. Usaha perikanan cenderung stagnan karena usaha perikanan didominasi oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan tradisional. Armada kapal perikanan didominasi oleh kapal motor dan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT. Sementara itu, kepemilikan lahan usaha budidaya masih rata-rata di bawah 1 ha.
4. Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industri pengolahan skala mikro dan kecil.
5. Produk perikanan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer, berupa penggaraman/pengeringan, pemindangan, dan pengasapan/pemanggangan. Terkait dengan komoditas rumput laut, yang merupakan salah satu produk terbesar budidaya, mayoritas dijual dalam bentuk bahan baku olahan, yang dikeringkan.

#### **4.1.13 Urusan Pertanahan**

Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun di daerah pada umumnya pemerintah selalu diperhadapkan permasalahan penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum terlihat dari pembebasan tanah yang berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta perangkat hukum turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun

demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah.

#### **4.1.14 Urusan Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hingga tahun 2016 indeks kualitas lingkungan provinsi Gorontalo baru mencapai 71,06 persen, permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah :

1. Penurunan kualitas air permukaan
2. Kerusakan danau limboto
3. Penambangan emas tanpa izin (PETI)
4. Kerusakan Hutan dan Lahan
5. Kerusakan terumbu karang dan mangrove
6. Rendahnya tingkat ketaatan kegiatan dan atau usaha untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan
7. Kebersihan dan kehijauan kota yang belum merata antar kabupaten/kota
8. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup masih rendah
9. Longsor dan banjir yang hampir terjadi setiap tahun.

Tantangan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kedepan, yaitu (i) Meningkatkan Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) sebagai dasar untuk mendapatkan data dan informasi lingkungan hidup (ii) memperkuat upaya pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan; (iii) Penguatan kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup: kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan (iv) Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

#### **4.1.15 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Admininstrasi kependudukan menjamin partisipasi, perlindungan, pemberdayaan, serta kesamaan hak dan kewajiban setiap penduduk, baik dewasa maupun anak, dalam pembangunan, antara lain melalui kepemilikan dokumen bukti kewarganegaraan, dengan

segala hak dan kewajibannya. Akses penduduk terhadap berbagai dokumen tersebut adalah melalui pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil. Undang-Undang No. 24/2013, telah mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Namun, sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya pelaporan sebagai warga sipil dan kepemilikan dokumen kependudukan.

#### **4.1.16 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan pembangunan perdesaan, Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Permasalahan pembangunan perdesaan dihadapkan dengan kondisi (i) Bahwa tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan masih rendah; (ii) belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan ; (iii) ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi; (iv) belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa sebagaimana amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa; (v) pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Tantangan dalam pembangunan perdesaan adalah bagaimana upaya dalam meningkatkan akses layanan publik dan ekonomi masyarakat di desa.

#### **4.1.17 Urusan Perhubungan**

Pembangunan perhubungan dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang berkualitas untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam pembangunan sector Perhubungan telah tersedia 3 terminal tipe A dan pada tahun 2015 dilakukan pembangunan fasilitasi penunjang terminal tipe C pada 1 terminal yang direncanakan akan dinaikkan status menjadi terminal tipe B. Saat ini di Provinsi Gorontalo belum memiliki terminal dengan kriteria tipe B dan direncanakan 4 (empat) terminal tipe C yang ada di Kabupaten dan Kota diusulkan untuk dinaikkan statusnya menjadi terminal tipe B. Kemudian dilakukan pelayanan angkutan darat perintis yang melayani 4 lintasan (Gorontalo-Bondawuna, Gorontalo-

Bubaa, Gorontalo-Pangea, Terminal Isimu-Mulyonegoro-Satria), serta pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ yang hingga tahun 2015 sudah ada 4 (empat) ruas jalan provinsi, yaitu ruas jalan Kabila-Toto dan ruas jalan Gorontalo-Suwawa, ruas jalan Suwawa-Tulabolo, ruas jalan Raja Eyato-Isimu.

Dalam transportasi laut terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan kepala kantor pelabuhan Gorontalo yang secara administratif menjalankan operasionalnya. Provinsi Gorontalo memiliki 5 pelabuhan laut yang terletak di pesisir utara dan selatan. Di pesisir utara terdapat pelabuhan anggrek yang di khususkan untuk melayani barang secara cargo dan peti kemas baik pelayaran dalam negeri maupun internasional, serta pelabuhan kwandang digunakan untuk pelayaran rakyat ke Buol dan Toli-Toli Sulawesi Tengah. Sedangkan dipesisir selatan terdapat pelabuhan Gorontalo, pelabuhan Tilamuta dan pelabuhan Bumbulan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul dan pendistribusi di daerah kawasan Teluk Tomini. Kelima pelabuhan tersebut terus dilakukan upaya pengembangannya baik melalui APBN maupun APBD untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat di setiap pelabuhan.

Pengembangan transportasi udara di Provinsi Gorontalo terus diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Djalaluddin yang menjadi satu - satunya bandar udara di Gorontalo dengan status bandara Nasional kelas II C, kapasitas landasan dapat didarati Boeing 737, Run Way panjang 2.500 m x 45 m, Taxiway 2 buah ukuran 115 m x 23 m, Apron ukuran 231,5 m x 80 m untuk kapasitas parkir 2 (dua) buah pesawat. Tahun 2015 pembangunan terminal baru Bandara Djalaludin seluas 4.896 m<sup>2</sup> selesai dibangun dan diopersikan di tahun yang sama. Disamping itu untuk mewujudkan pembangunan Infrastruktur Kereta Api, maka tahun 2014 telah disusun 1 dokumen untuk Pra-FS/FS jalur Kereta Api dan tahun 2015 telah dilakukan penetapan trase jalur kereta api Bitung-Gorontalo-Isimu sepanjang 340 Km.

Walaupun telah banyak hal yang dicapai dalam pembangunan sektor perhubungan, namun masih banyak permasalahan yang akan dihadapi kedepan, yaitu (i) makin kompleksnya permasalahan dibidang transportasi, Bandara dan Pelabuhan akibat bertambahnya populasi penduduk dan semakin cepatnya perpindahan serta pergerakan barang dan jasa; (ii) masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum; (iii) belum efisiennya angkutan dari dan ke pelabuhan, terutama di pelabuhan anggrek dan pelabuhan tilamuta; dan (iv) masih rendahnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan yang ada.

Tantangan kedepan dalam pengembangan sektor perhubungan adalah (i) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi masal yang aman dan murah; (ii) meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dalam transportasi; (iii) memfasilitasi dan menjamin percepatan dan keberlangsungan pembangunan transportasi skala nasional yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo.

#### **4.1.18 Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan pembangunan komunikasi dan informatika hingga saat ini diperhadapkan dengan belum terintegrasinya system komunikasi dan informasi instansi pemerintah yang disebabkan oleh (i) masih terbatasnya akses dalam pemanfaatan teknologi informasi; (ii) masih rendahnya Infrastruktur komunikasi informasi; (iii) belum optimalnya upaya pelayanan informasi public; (iv) belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat; belum adanya regulasi daerah yang mengatur tata kelola komunikasi dan informasi yang baik dan sesuai kebutuhan; dan (v) belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

Tantangan dalam pengembangan komunikasi dan informasi adalah mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat.

#### **4.1.19 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah; (i) rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM (ii) rendahnya kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis (iii) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar (iv) belum terbangunnya kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM (v) kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Tantangan dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah bagaimana pemerintah dapat meningkatkan akses permodalan terhadap koperasi dan UMKM, meningkatkan kapasitas SDM, manajemen teknis dan adopsi teknologi bagi pelaku UMKM, dan



mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggota koperasi yang menjadi kekuatan inti koperasi dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

#### **4.1.20 Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan dalam mendorong investasi di daerah adalah ketersediaan fasilitas yang belum memadai, seperti jalan, pelabuhan, komunikasi serta tenaga kerja; Proses perijinan masih belum efisien serta proses kerja birokrasi yang rumit karena pemegang otoritas pemberian izin berada di tangan instansi yang terpisah-pisah belum semuanya ditanganai perizinan satu pintu; ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas; dan proses pengadaan dan perizinan lahan.

#### **4.1.21 Urusan Pemuda Dan Olahraga**

Pembangunan dalam bidang kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Hingga tahun 2016, jumlah organisasi pemuda yang terdapat di Provinsi Gorontalo masih sebanyak 52 kelompok, sedangkan organisasi olahraga berjumlah 177 kelompok. Berbagai prestasi berhasil diraih oleh putra dan putri Gorontalo melalui berbagai event, yaitu pada tahun 2014 untuk cabang tenis meja putri meraih medali emas dan cabang pencak silat meraih medali perak pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Jakarta, Untuk cabang Sepak Takraw Juara II Kejuaraan Nasional PPLP di Palu, *Asean Beach Games* di Thailand, *Asian University Games* di Palembang, dan *Asean School Games* di Vietnam, dan meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asean School Games* di Philipina, Asean Games di Korea, dan Kejurnas Super Series di Myanmar. Sementara untuk bidang olahraga Karate memperoleh 3 medali perak dan 5 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional PPLP di Medan, untuk bidang olahraga renang memperoleh 2 medali perak dan 1 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional PPLP di Musi Banyuasin dan untuk tenis lapangan meraih 1 medali perunggu.

Permasalahan yang harus dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olahraga antara lain: (1), karakter dan jati diri pemuda masih rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi, terutama globalisasi dunia melalui teknologi informasi (2), keterampilan dan

kecakapan hidup, serta kemandirian pemuda belum optimal (3) partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah (4) prasarana dan sarana olahraga relative terbatas, (5) peran sentra keolahragaan, seperti sekolah khusus olahraga, PPLP/PPLM, Puslatda belum optimal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, (6) SDM keolahragaan yang berkualitas masih terbatas (7) apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Tantangan pembangunan pemuda dan olahraga ke depan antara lain: (i) memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi; (ii) meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; dan (iii) meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. (iv) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga; (v) meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; dan (vi) meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industry olahraga.

#### **4.1.22 Urusan Perpustakaan**

**Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca.** Sejak tahun 2012 telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca dan hasilnya pada tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan menjadi 59.621 orang dan meningkatnya jumlah koleksi buku dan judul bacaan perpustakaan menjadi sebanyak 2.150 koleksi. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan perpustakaan antara lain (i) Belum tersedianya gedung, sarana prasarana perpustakaan; (ii) belum tersedianya gedung depo penyimpanan arsip statis dan arsip vital; (iii) profesionalisme dan kompetensi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang masih terbatas; dan (iv) pemasyarakatan budaya sadar arsip, baik dikalangan aparatur maupun masyarakat secara luas masih kurang.

Dalam pengembangan perpustakaan ke depan pemerintah daerah dihadapkan pada bagaimana upaya mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya, mengingat adanya kecenderungan masyarakat yang lebih memanfaatkan informasi internet daripada membaca buku teks serta meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.

#### **4.1.23 Urusan Persandian**

Permasalahan utama yang dihadapi adalah *security awareness* dari pejabat publik yang masih rendah, payung hukum persandian yang belum kuat, kualitas dan kuantitas peralatan sandi belum ideal/tersedia, serta sumber daya manusia persandian yang belum tersedia.

#### **4.1.24 Urusan Statistik**

Untuk memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, menjadi tugas pemerintah agar mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis dengan penataan organisasi tata laksana penyediaan data dan informasi dan didukung sumberdaya manusia yang professional serta teknologi informasi yang modern. permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang statistik adalah sebagai berikut: (1) Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dasar dan data sektoral yang update belum optimal; (2) meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan tidak dibarengi dengan kemampuan penyediaan akibat kekurangan SDM, dan sarana prasarana yang memadai (3) koordinasi antar instansi disadari masih kurang sehingga data dan informasi yang dibutuhkan masih tumpang tindih, bahkan cenderung sulit untuk disediakan; (4) keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan system TIK belum optimal dan cenderung menghambat proses pengolahan data.

#### **4.1.25 Urusan Kearsipan**

Permasalahan dalam pengembangan bidang kearsipan adalah budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah dan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan.

#### **4.1.26 Urusan Kebudayaan**

Warisan budaya mengandung nilai-nilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya suatu daerah dan menjadi kebanggaan nasional. Untuk itu pemahaman nilai positif sejarah serta perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan aktualisasi nilai dan tradisi warisan budaya daerah perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya daerah.

Permasalahan dalam upaya menjaga dan mempertahankan kelestarian budaya daerah kedepan adalah (1) adanya kecenderungan mulai lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah

karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi; (2) semakin turunnya minat warga masyarakat terutama generasi muda terhadap kebudayaan daerah; (3) kurangnya informasi dan pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah daerah.

#### **4.1.27 Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan dalam pengembangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan adalah (1) masih tingginya harga pakan ikan; (2) rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan; (3) teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah; (4) belum optimalnya kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan; (5) terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan; (6) terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar; (7) terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon; (8) terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengakses data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat; (9) Penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) masih sangat terbatas; (10) belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir; dan (11) Kualitas lingkungan perairan (mangrove, terumbu karang, sungai, danau) di beberapa lokasi telah terjadi penurunan.

#### **4.1.28 Urusan Pariwisata**

Provinsi Gorontalo memiliki banyak potensi wisata yang beragam dan tersebar di seluruh wilayah dimana potensi tersebut memiliki keunggulan kompetitif. *Vice versa*, meskipun telah berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Provinsi Gorontalo, namun keunggulan kompetitif ini hingga saat ini belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat di lokasi obyek wisata tersebut. Olehnya, perlu kiranya pemerintah menemukenali program yang tepat dalam pelibatan masyarakat ini dimana masyarakat seharusnya merupakan obyek sekaligus subyek dari kegiatan pariwisata. Inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT). Hal ini sesuai dengan spirit zaman saat ini yakni pembangunan berbasis masyarakat. Adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (local way of life).

Oleh karena itu dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo berusaha menyusun suatu rencana pengembangan pariwisata yang berkualitas, serasi dan optimal, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, mewujudkan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung lingkungan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencapai keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana hal ini adalah merupakan terjemah dari RIPPDA yang telah memiliki legalitas yakni Perda No. 2 tahun 2014.

Dalam pengembangan konsep pariwisata tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah (1) kondisi alam menjadikan terhambatnya aksesibilitas pengembangan kepariwisataan secara merata; (2) banyaknya potensi objek wisata yang tersebar di seluruh wilayah provinsi; (3) rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, dimana saat ini kurang lebih 99 persen objek wisata dikelola oleh pemerintah; dan lemahnya informasi produk pariwisata yang ada secara komprehensif dan akurat.

Tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata kedepan adalah (i) meningkatkan Promosi Pariwisata Daerah untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal, fokus pada 6 kawasan strategis pengembangan dan pembangunan pariwisata yang ditetapkan dalam RIPPDA; (ii) Pembangunan Destinasi Pariwisata untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (iii) membangun industri pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata daerah; serta (iv) membangun Kelembagaan Pariwisata untuk sumber daya manusia pariwisata dan organisasi kepariwisataan.

#### **4.1.29 Urusan Pertanian**

Pengembangan sektor pertanian kedepan diperhadapkan dengan kondisi adanya kecenderungan terus menurunnya pertumbuhan sektor pertanian (share PDRB/Jumlah Tenaga kerja) dan NTP akibat belum optimalnya produksi dan produktivitas yang disebabkan permasalahan: (i) meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman; (ii) kepemilikan lahan relatif sempit; (iii) fluktuasi perubahan iklim; (iv) belum optimalnya infrastruktur pertanian; (v) daya saing produk pertanian relatif masih

rendah; (vi) masih adanya pemotongan sapi betina produktif; (vii) terbatasnya petugas lapangan pertanian; (viii) rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi informasi, pasar dan permodalan; (ix) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani; dan masih terbatasnya RPH modern berstandar SNI.

#### **4.1.30 Urusan Kehutanan**

Hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Permasalahan dalam pengelolaan hutan adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan disebabkan tata kelola hutan yang baik masih belum berjalan. Di sisi lingkungan, kualitas sumber daya hutan juga semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, konversi kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, perambahan liar, kebakaran hutan, penebangan liar dan perdagangan hasil hutan tanpa izin.

#### **4.1.31 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Permasalahan energy dan Sumberdaya Mineral di Provinsi Gorontalo adalah masih terbatasnya potensi dan pasokan/suply energy dan masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai ketentuan.

#### **4.1.32 Urusan Perdagangan**

Permasalahan dalam peningkatan perdagangan dalam daerah adalah belum baiknya sistem distribusi barang dan jasa serta masih terbatasnya jaringan pasar dalam dan luar negeri, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan, terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi, masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen, masih rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

#### **4.1.33 Urusan Perindustrian**

Permasalahan dalam rangka meningkatkan bidang industri hingga saat ini adalah bahwa pemasaran hasil industri masih bersifat lokal, peralatan dan cara kerja masih sederhana,

sehingga kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan rendah, masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor, industri pengolahan yang ada belum variatif dan inovatif, masih rendahnya kualitas manajemen pengelolaan industri kecil menengah di daerah dan masih rendahnya kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan.

#### **4.1.34 Urusan Transmigrasi**

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa, namun upaya untuk memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi belum optimal dilakukan, masih rendahnya kesejahteraan sosial ekonomi termasuk kemandirian pangan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi adalah permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kawasan transmigrasi 5 tahun kedepan.

### **4.2 Isu Strategis**

#### **4.2.1 Isu Strategis Daerah**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis dari permasalahan utama yang dihadapi, maka isu strategis pembangunan Provinsi Gorontalo, yaitu:

##### **1. Kemiskinan dan Pengangguran.**

Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%, kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan menjadi hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah

kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Berbagai kebijakan untuk mencapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui :

- Peningkatan layanan dan cakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Pemberian Bantuan Operasional Siswa "Prodira" bagi siswa sekolah menengah untuk seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- **Penyediaan dan perluasan akses pangan: *Pemberian bantuan pangan non tunai*** untuk menjamin pertumbuhan dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota.
- Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP - EK) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara
- Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat.



Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 167.445 jiwa atau 30,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Meskipun merupakan yang paling dominan, namun selama periode 2012-2016 persentasenya cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan dan sektor jasa cenderung mengalami peningkatan.

Dari status pendidikan ditahun 2016 pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 atau 14,07 persen.

Pola Pembangunan Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedepan akan didorong untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

## **2. Sumber daya alam yang berkelanjutan.**

Isu ini dititikberatkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.

## **3. Infrastruktur dasar dan strategis.**

Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relative masih belum optimal, sehingga kedepan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GOR), pengembangan bandara Djalaluddin, pembangunan bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek.

Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, pembangunan jalan strategis provinsi, pengembangan transportasi dan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur dalam meminimalisir dampak bencana.

Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya.

#### **4. Kualitas sumber daya manusia.**

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

#### **5. Tata Kelola Pemerintahan.**

Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*).

Dalam lima tahun mendatang Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mendorong penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah disusun menjadi acuan pemerintah dan seluruh SKPD dalam menjabarkan rencana aksinya. Sehingga diharapkan capaian indeks Reformasi Birokrasi akan terus meningkat, Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terus membaik, dalam pelayanan publik, masyarakat akan lebih terlayani dengan baik yang ditunjukkan dengan membaiknya survey kepuasan masyarakat dan dalam pengelolaan keuangan daerah akan terus diraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### 4.2.2 Isu strategis internasional

##### 1. Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global tetap menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian daerah sebagai bagian dari perekonomian nasional dalam lima tahun kedepan, tantangan dan peluang tersebut sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah :

**Proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat.** Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh besarnya obligasi pemerintah dan belum adanya rencana penyesuaian ekonomi jangka menengah.

**Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik.** Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Hal tersebut mengakibatkan aliran modal asing ke Negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat, terutama Negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Selain itu, pertumbuhan ekspor negara berkembang akan semakin kuat, seiring dengan momentum pemulihan perdagangan global. Rantai suplai global dan regional pun akan terus berkembang, karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi akan menyebabkan fragmentasi rantai produksi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Kondisi ini akan mempengaruhi dinamika *Foreign Direct Investment* (FDI) antarnegara dan tren integrasi perdagangan sehingga akan mendorong ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

**tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang,** tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan

terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan.

**Semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor.** Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di dunia meningkat dengan sangat pesat, seperti berupa *Sanitary-and-Phytosanitary measures* dan *export taxes/restriction*. Dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin.

## **2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh daerah secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan daerah perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Gorontalo untuk meraih keberhasilan MEA sekaligus mendukung pembangunan nasional.

## **3. Geo Politik International**

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia. Upaya penyeimbangan kembali oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (*Rebalancing Asia Pacific*) merupakan salah satu perkembangan geo-politik saat ini. Perluasan kekuatan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dilakukan dengan menggelar lebih banyak armada di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga memperkuat kerja sama militer dengan Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan,

Singapura, India, New Zealand, Vietnam dan Indonesia; dan mengupayakan kerjasama militer dengan Tiongkok. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam menggalang keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam *Trans Pacific Partnership (TPP)*, meningkatkan bantuan luar negeri ke Asia Pasifik, serta meningkatkan volume perdagangan dengan negara di Asia Pasifik.

Kekuatan baru Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduknya yang besar, serta peningkatan kekuatan militernya menandai peta politik ekonomi global dan regional. Tiongkok telah meluaskan pengaruhnya di Afrika dengan memasarkan produk-produknya dan melakukan pendekatan budaya antara lain seperti bahasa. Pengaruh Tiongkok terhadap masyarakat internasional semakin menguat dan diperkirakan akan tetap menguat dalam lima tahun ke depan. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menyeimbangkan kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok melalui strategi diplomasi, kerja sama ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Perhatian yang besar dari Amerika Serikat terhadap persoalan Laut Tiongkok Selatan diidentifikasi sebagai salah satu strategi Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok.

Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi.

Perubahan situasi geo-politik global juga ditandai dengan 'pertarungan' penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan

negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

#### **4.2.3 Isu strategis nasional**

##### **1. Perekonomian Nasional**

Kebijakan ekonomi nasional diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Perkiraan pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor nasional ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai suplai global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai suplai internasional.

Peningkatan daya saing perekonomian nasional menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan daya saing perekonomian perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan

kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan dalam RPJMN 2015 - 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta (USD3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran, investasi didorong dan mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun 2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan meningkatkan kontribusi ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor diperkirakan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen dan 2,5 persen pada tahun 2019.

Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0–5,0 persen pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas, diantaranya: (i) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup; (ii) meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (iii) transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low-skilled industries* menjadi *skills-based industries*; dan (iv) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja negara, dan optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang.

Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan Negara diperkirakan akan meningkat rata-rata 17,2 persen PDB dalam periode 2015-2019. Peningkatan pendapatan negara tersebut didorong utamanya melalui penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai sebesar 16 persen PDB (termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB). Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat akan meningkat rata-rata 15,3 persen per tahun sepanjang 2015-2019. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara, komposisi belanja pemerintah pusat akan mengalami perubahan. Salah satunya dapat dilihat dari menurunnya belanja subsidi energi dari 1,3 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 0,6 persen PDB pada tahun



2019. Selain itu, penghematan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat, yang akan dijaga pada tingkat yang wajar.

Belanja modal diproyeksikan mengalami peningkatan dari 2,4 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 3,9 persen PDB pada tahun 2019. Peningkatan belanja modal tersebut terutama untuk membiayai berbagai program infrastruktur pemerintah. Belanja ke daerah diperkirakan akan meningkat rata-rata 17,3 persen per tahun. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pemenuhan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan dialokasikannya Dana Desa. Dana Desa diproyeksikan akan meningkat secara bertahap sepanjang 2015-2019.

Melalui upaya peningkatan pendapatan dan kualitas belanja negara, kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran diperkirakan akan mengalami peningkatan. Keseimbangan primer akan membaik dan menjadi positif pada tahun 2019, sementara defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebagaimana diamanatkan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sepanjang tahun 2015-2019, defisit anggaran akan menurun dan mencapai 1,0 persen PDB pada tahun 2019. Dengan keseimbangan primer dan defisit anggaran yang membaik, rasio stok utang akan menurun menjadi 20,0 persen PDB pada tahun 2019.

## **2. Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat secara cukup stabil berkisar antara 5,0-6,6 persen selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Namun demikian, kesenjangan antar pendapatan melebar seperti tercermin dari *gini ratio* yang naik dari 0,36 (2007) menjadi 0,41 (2013). Demikian pula, pertumbuhan di daerah-daerah juga terus meningkat. Namun, ketimpangan antar wilayah masih terjadi dengan porsi PDB di Jawa terhadap PDB nasional yang relatif tinggi dan cenderung tidak berubah dari tahun 2008 (57,9 persen) ke tahun 2013 (58 persen). Indikator sosial, seperti angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi (hasil survei Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup) dan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 19,6 persen. Kondisi ini mencerminkan

permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan sumberdaya manusia akibat tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumbangan sumberdaya alam, yakni sebesar kurang lebih 25% Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya mineral, dan hutan, menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan juga masih rendah. Sebagai cerminan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dipergunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup masih menunjukkan nilai sebesar 64,21 pada tahun 2012.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang terus ditingkatkan harus dapat menggunakan sumberdaya alam secara efisien agar tidak menguras cadangan sumberdaya alam, dipergunakan untuk mencapai kemakmuran yang merata, tidak menyebabkan masalah lingkungan hidup, sehingga dapat menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui

Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6/2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Bahkan Badan Kerjasama antar-Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokoh masyarakat desa.

Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, dihadapkan pada tiga isu strategis di dalam RPJMN 2015-2019, Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Kekuatan mitigasi/penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Sehubungan dengan itu, untuk melindungi ketahanan ekonomi khususnya pangan dan energi, serta ketahanan masyarakat terutama petani, nelayan dan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan rentan terhadap perubahan iklim, maka pada tahun 2013 telah disusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). RAN API berisi: (i) rencana aksi adaptasi prioritas sektor dan lintas sektor dalam jangka pendek (2013-2014); (ii) upaya pengarusutamaan rencana aksi adaptasi ke dalam RPJMN 2015-2019; dan (iii) arah kebijakan adaptasi dalam jangka panjang (2020-2025). RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/resilient development*) di tingkat nasional.

Upaya adaptasi perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan di bidang: (i) ekonomi; (ii) sistem kehidupan; (iii) ekosistem; (iv) wilayah khusus; dan didukung oleh sistem pendukung adaptasi perubahan iklim. Ketahanan ini diwujudkan melalui upaya di berbagai sektor, yaitu: (i) ketahanan pangan; (ii) kemandirian energi; (iii)

ketahanan infrastruktur; (iv) ketahanan kesehatan masyarakat; (v) ketahanan permukiman; (vi) ketahanan ekosistem; (vii) ketahanan perkotaan; dan (viii) ketahanan pesisir dan pulau kecil.

Dokumen RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim daerah sejalan dengan RAN-API, serta menginternalisasikan dalam perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). Untuk mendorong pelaksanaan adaptasi perubahan iklim, diperlukan upaya penerapan RAN-API untuk dapat secara nyata meningkatkan ketahanan (adaptasi) masyarakat terhadap perubahan iklim. Langkah konkrit yang akan dilakukan pada lima tahun ke depan adalah menerapkan rencana aksi adaptasi di 15 (lima belas) daerah rentan perubahan iklim, sebagai daerah percontohan penerapan RAN-API.

**Agenda Pasca *Millenium Development Goals (MDGs)***, Di dalam *Open Working Groups (OWG)* untuk Penyusunan Agenda Pasca 2015, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012, disepakati prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk masukkan Agenda Pasca 2015, yaitu: (1) *SDGs* tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen *MDGs* yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) *SDGs* akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) *SDGs* akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environment development*) secara berimbang dan terpadu; dan (4) *SDGs* akan menjadi bagian koheren dan terintegrasi dalam Agenda Pembangunan Paska-2015.

Beberapa fokus dalam *SDGs* yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender yang sangat mewarnai *MDGs* akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antar negara. Selain itu, masalah gender

dan anak-anak, tidak saja anak perempuan namun juga anak laki-laki; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian (means of implementation).

Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 59 tahun 2017. Perpres ini menetapkan 17 goals dan 169 target dan selaras dengan target RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan. 17 tujuan tersebut, yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

### **3. Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019**

Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.
- Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.
- Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.
- Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.

#### **Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019, adalah:**

1. Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
2. Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
3. Perumahan Rakyat
4. Revolusi Karakter Bangsa
5. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat restorasi social
6. Revolusi Mental
7. Kedaulatan Pangan

8. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan
9. Kemaritiman
10. Industri
11. Pariwisata
12. Inovasi dan Teknologi

### **Arahan Pengembangan Sulawesi**

Komitmen pemerintah pusat untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah telah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, yaitu: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; prioritas ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; prioritas kelima: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; prioritas keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; prioritas ketujuh: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; serta prioritas kesembilan: Memperteguh KeBhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Misi dan agenda prioritas tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Pulau Sulawesi disebutkan dalam RPJMN 2015 – 2019 sebagai;

- a) Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- b) Pengembangan industri berbasis logistik;
- c) Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
- d) Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
- e) Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

## Prioritas Program Pembangunan Nasional

Sementara untuk kegiatan strategis nasional di Gorontalo yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 diuraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.**  
**Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional**  
**di Provinsi Gorontalo**

No	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
<b>PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG</b>	
1.	Pembangunan jalur KA antara Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung
<b>PERHUBUNGAN DARAT</b>	
	Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Gorontalo*
<b>PERHUBUNGAN UDARA</b>	
1.	Pengembangan Bandara Jalaludin
2.	Pembangunan Bandara Pohuwato*
<b>PERHUBUNGAN LAUT</b>	
1.	Pengembangan Pelabuhan Anggrek
2.	Pengembangan Pelabuhan Kwandang
3.	Pengembangan Pelabuhan Tilamuta
4.	Pengembangan Pelabuhan Gorontalo
5.	Pengembangan Pelabuhan Bumbulan
<b>JALAN</b>	
	Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR)
	Pembangunan Jalan Lintas Timur (Pentadu – Bilato – Biluhu Barat – Gorontalo)
	Pembangunan Jalan Penghubung Gorontalo – ke Manado
	Pembangunan Jalan Lintas Penghubung (Tolinggula – Marisa)
<b>ASDP</b>	
	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Marisa
	Pengembangan Dermaga Penyeberangan Wakai
<b>KETENAGALISTRIKAN</b>	
	PLTG/MG Gorontalo Peaker 100 MW
	PLTU Sulbagut 1 50 MW
	PLTU Sulbagut 3 50 MW
	Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
	Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi
<b>Telekomunikasi dan Informatika</b>	
	Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
	Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
<b>SUMBER DAYA AIR</b>	
1.	Pembangunan Bendung Randangan (Multi Year) Pohuwato
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan Kiri (Lanjutan) Pohuwato
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Randangan Kanan Pohuwato
4.	Pembangunan / Peningkatan Bendung Piloheyanga (Multi Year) Gorontalo
5.	Pembangunan Jaringan Reklamasi Rawa Imbodu Pohuwato
6.	Pengendalian Banjir Sungai Tilamuta Boalemo
7.	Pengendalian Banjir Sungai Molosipat Pohuwato
8.	Pengendalian Banjir Sungai Lemito Pohuwato
9.	Pengendalian Banjir Sungai Bone Bone Bolago
10.	Pengendalian Banjir Sungai Tolinggula Prov. Gorontalo
11.	Pengendalian Banjir Sungai Pontolo Gorontalo Utara
12.	Pembangunan Long Storage Bulia Boalemo
13.	Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Boalemo Boalemo
14.	Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Pohuwato Pohuwato
15.	Pembangunan Pengendali Sedimen Wil. Kab Gorontalo Utara Gorontalo Utara
16.	Pengamanan Pantai Sumalata Gorontalo Utara
17.	Pengamanan Pantai Tolinggula Gorontalo Utara
18.	Pengamanan Pantai Atinggola Gorontalo Utara
19.	Pengamanan Pantai Leato Kota Gorontalo
20.	Pengamanan Pantai Biluhu Barat Kab. Gorontalo
21.	Pengamanan Pantai Biluhu Timur Kab. Gorontalo
22.	Pembangunan Waduk Dumbaya Bulan (Bone Hulu)



No	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
23.	Pembangunan Waduk Toheti Dehuwa Bone Bolango
24.	Pembangunan Waduk Kayu Merah (multi years) Gorontalo
25.	Revitalisasi Danau Limboto Gorontalo
26.	Revitalisasi Danau Perintis
<b>PENDIDIKAN</b>	
1.	Usulan pembangunan 18 RPS
2.	Pembangunan SMK Pertanian dan SMK Perikanan di Gorontalo Utara dan Pohuwato (masing-masing 1 USB)
3.	Pembangunan 26 RKB SMK dan 56 RKB SMA di 5 Kabupaten
4.	Pembangunan 2 USB SMK dan 8 USB SMA di 5 Kabupaten.
<b>KESEHATAN</b>	
1.	Pengembangan RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie (fisik dan alat kesehatan)
2.	Peningkatan kapasitas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (pembangunan gedung, alat kesehatan, dan pengadaan mobil operasional)
3.	Pengadaan PNET dan PNET Set
4.	Pusling perairan (wilayah kepulauan di Kab. Gorontalo Utara) sebanyak tiga unit

Sumber : RPJMN 2015 - 2019

#### 4.2.4 Isu strategis Regional

Tinjauan Atas Dokumen RPJMD Sulawesi Tengah Dan Sulawesi Utara

##### a. RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021

###### Beberapa Poin dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021

- Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 adalah **"Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing"**
- Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah:
  1. Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum Dan HAM.
  2. Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Mendukung Kemandirian Energi
  3. Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
  4. Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal Dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.
  5. Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berbudaya.

##### b. RPJMD Sulawesi Utara 2016-2021

- Visi Provinsi Sulut 2016-2021 : terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
- Visi Provinsi Sulawesi Utara dalam RPJMD 2016-2021 sebenarnya mengacu pada trisakti yang diwujudkan dalam bentuk :
  1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
  2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.

3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembedaan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia kedepan.

▪ **Isu Strategis Provinsi Sulawesi Utara**

1. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.
2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Melalui Pembangunan Pendidikan Dan Kesehatan.
3. Infrastruktur.
4. Pembangunan Kawasan Perbatasan Dan Kepulauan.
5. Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.
6. Tata Kelola: Birokrasi Efektif Dan Efisien.
7. Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
8. Pengelolaan Bencana Dan Mitigasi Iklim.